

## **Implementasi bantuan sosial pada era pandemi Covid-19: Evaluasi aspek transparansi dan akuntabilitas**

**Dumilah Ayuningtyas,<sup>a\*</sup> Humaatul Islam<sup>b</sup>, Sahfira Ulfa Hasibuan<sup>c</sup>, Cindy Margaretha<sup>d</sup>,  
Naurah Naziihah<sup>e</sup>, Nisa'atul Maharanita Fitrianingrum<sup>f</sup>, Ayudina Larasati<sup>g</sup>,  
Qurrata Ayuni<sup>h</sup>**

Universitas Indonesia. Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

<sup>a</sup> [dumilah@gmail.com](mailto:dumilah@gmail.com); <sup>b</sup> [humaatul.islam@gmail.com](mailto:humaatul.islam@gmail.com); <sup>c</sup> [sahfiraulfa@gmail.com](mailto:sahfiraulfa@gmail.com); <sup>d</sup>

[cindy.margaretha@ui.ac.id.com](mailto:cindy.margaretha@ui.ac.id.com); <sup>e</sup> [naurah.naziihah@gmail.com](mailto:naurah.naziihah@gmail.com); <sup>f</sup> [nisaatul.maharanita@ui.ac.id](mailto:nisaatul.maharanita@ui.ac.id);

<sup>g</sup> [ayudinalarasanti@gmail.com](mailto:ayudinalarasanti@gmail.com); <sup>h</sup> [qurrataayuni@ui.ac.id](mailto:qurrataayuni@ui.ac.id)

\* Corresponding Author

**Abstrak:** Virus Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menginfeksi jutaan orang yang membutuhkan bantuan pemerintah selama pandemi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi proses penyaluran bantuan sosial yang diberikan pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19. Survei cepat secara daring dilakukan pada 279 responden dari 12 provinsi di Indonesia. Wawancara juga dilakukan untuk memperkuat hasil survei cepat dan merupakan bentuk triangulasi metoda. Hasil penelitian mendapatkan sebagian besar responden merasa penyaluran bantuan sosial di masa pandemi belum transparan dan belum tepat sasaran, antara lain disebabkan oleh terpisahnya alokasi anggaran di beberapa kementerian, kurang akurat dan belum terintegrasinya data. Penguatan peran pemerintah daerah dan keterlibatan organisasi kemasyarakatan serta adanya fleksibilitas penyesuaian bentuk bansos dan mekanisme pemberian bansos sesuai dengan kebutuhan lokal atas inisiatif kepemimpinan di daerah-daerah masing-masing merupakan rekomendasi penelitian ini.

**Kata Kunci:** Covid-19; Bantuan Sosial; Pemerintah; Transparansi

**How to Cite:** Ayuningtyas, D., Islam, H., Hasibuan, S. U., Margaretha, C., Naziihah, N., Fitrianingrum, N. M., Larasanti, A., & Ayuni, Q. (2022). Implementation of social assistance in the era of the Covid-19 Pandemic: Evaluation of transparency and accountability aspects. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 51-62. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.796>



### **Pendahuluan**

*Coronavirus disease of 2019* (Covid-19) membuat perubahan mendasar pada setiap aspek kehidupan, termasuk kesehatan masyarakat global. Wabah pertama tercatat di sebuah provinsi di China, dalam tiga bulan penyakit tersebut menyebar ke hampir setiap negara. Indonesia yang semula merasa aman dari Covid-19 ternyata juga tak mampu melindungi diri dari penyakit mematikan ini. Sejak Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto secara resmi mengumumkan kasus Covid-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020, Covid-19 terus menyebar ke seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta sebagai pusat penyebaran. Dimulai dengan dua penemuan kasus positif di Depok, jumlah kasus meningkat berlipat ganda menjadi beberapa ribu dan menyebar ke 34 negara provinsi dalam waktu kurang dari sebulan. Akibat penyebaran virus yang demikian meluas dan sulit untuk dikendalikan, Presiden pada 13 April 2020 mengumumkan bahwa Covid-19 telah menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 (Dosen Lintas Fakultas UGM, 2020).

PSBB berdampak besar pada kehidupan masyarakat, karena membatasi interaksi antar komunitas dan aktivitas sehari-hari, mengganggu aktivitas ekonomi, dan banyak yang kehilangan mata pencaharian karena perusahaan tidak mampu mempertahankan karyawan. Selain itu, tingkat kejahatan juga akan meningkat karena pendapatan menurun. Covid-19 berdampak negatif pada sebagian besar masyarakat, Covid-19 tidak hanya meningkatkan jumlah kelompok marginal, tetapi juga membentuk kelompok marginal baru. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok yang paling rentan terkena hantaman kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi penyebaran virus, yaitu penerapan PSBB. Tanpa jaring pengaman sosial yang kuat, kelompok sosial ini menghadapi situasi keterpurukan yang semakin mendalam. Pemerintah memilih memberikan bantuan sosial

(Bansos) kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk mengantisipasi segala permasalahan sosial ekonomi terkait Covid-19. Kebijakan Bansos dapat membantu kelompok marginal dalam menghadapi dampak ekonomi, tapi dalam keadaan pandemi di mana setiap kebijakan harus dilakukan secara cepat dan teburu-buru, dapat membuka potensi korupsi dan tindakan tidak transparan para pejabat publik.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua komponen penting dari tata pemerintahan yang baik (Kohler & Bowra, 2020). Menurut Ellwood (1993), ada empat dimensi akuntabilitas: pertama, integritas dan legalitas; kedua, proses; ketiga, program; keempat, kebijakan.

Konsep transparansi mencakup memfasilitasi pemahaman pemangku kepentingan mengenai mekanisme pengambilan keputusan. Menurut Kohler dan Bowra (2020), transparansi dimulai dengan prosedur yang jelas mengenai standar akses ke informasi, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa administrator pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Studi ini mengevaluasi penyediaan dan distribusi bantuan sosial oleh pemerintah Indonesia selama Pandemi Covid-19. Secara khusus, mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos Covid-19 dalam rangka mengevaluasi dan memastikan sistem pemerintahan yang baik.

### Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif (*mix method*). Kuesioner dibagikan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat tentang transparansi dan kesesuaian sasaran implementasi Bansos. Untuk melengkapi kumpulan data skala besar ini, pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terstruktur kepada masyarakat dan tenaga medis dilakukan untuk menetapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan bantuan sosial dan dampaknya. Tahapan penelitian diawali dengan *desk study* untuk mengetahui bagaimana situasi pemberian dan penyaluran Bansos di Indonesia dari berbagai literatur tentang penelitian yang terkait sebelumnya. Tahap selanjutnya, dilakukan survei *online* untuk mengetahui gambaran persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas implementasi Bansos untuk menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemberian Bansos Covid-19. Sebanyak 279 responden dari berbagai daerah di Indonesia mengisi survei cepat. Responden tersebar pada provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Tengah. Dari 279 responden 34,05% (95 orang) di antaranya adalah penerima Bansos. Keterbatasan penelitian ini adalah sampel responden kurang mewakili populasi penduduk Indonesia. Penelitian kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap 7 informan yang memenuhi kriteria kecukupan dan kesesuaian yang memahami informasi dan memiliki posisi dan tanggung jawab terkait topik/area penelitian untuk membentuk pemahaman secara lebih mendalam. Studi ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi praktik pemberian bantuan sosial melainkan untuk memperoleh gambaran dan informasi umum tentang pelaksanaan bantuan sosial di beberapa provinsi di Indonesia pada akhir tahun 2020.

Dalam upaya menjaga kualitas dan keabsahan data, peneliti melakukan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu: (1) Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan teknik yang sama; (2) Triangulasi teknik atau metode, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data melalui teknik pengumpulan data yang berbeda-beda atau dan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data (Dalam hal ini, data yang diperoleh dengan wawancara mendalam, lalu dicek dengan observasi partisipatif, dan dokumentasi) untuk sumber data yang sama secara serempak (Hernawati, 2017; Sugiyono, 2010; Wibowo, 2014). Upaya menjaga kualitas data dilakukan pula dengan dukungan teknis seperti merekam dan mencatat proses wawancara, mendokumentasikan dan menggunakan daftar tilik pada saat observasi. Seluruh tahapan proses penelitian dilaksanakan dengan menjaga etika penelitian hingga diperolehnya surat izin Nomor 596/UN2.F10.D11/PPM00.02/2020 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kajian tentang pandemi Covid-19 berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Pemberian bantuan sosial dari pemerintah merupakan perwujudan tanggung jawab negara

dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pemberian bantuan sosial pendampingan merupakan bentuk isu penting dari tata pemerintahan yang baik dalam ketahanan kesehatan masyarakat dalam konteks pandemi Covid-19.

### Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil pelaksanaan pemberian bantuan sosial selama pandemi COVID-19, mengevaluasi apakah implementasi Bansos telah memenuhi targetnya. Rahmansyah et al. (2020) memetakan penyaluran bansos di Indonesia selama pandemi Covid-19. Mereka menemukan beberapa kendala dalam proses penyaluran bansos antara lain: alokasi anggaran dalam kementerian; kurangnya koordinasi dan keselarasan kebijakan bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah tentang jenis dan mekanisme penyaluran bantuan sosial; data penerima bantuan yang kadaluwarsa dan tidak terintegrasi; dan kurang memadainya komunikasi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pilihan bantuan sosial. Untuk meminimalkan masalah terkait penyaluran bansos, Rahmansyah et al. (2020) menyimpulkan bahwa kerjasama, koordinasi, dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga swasta perlu didukung oleh sistem yang efisien, terintegrasi, transparan, dan sistem yang bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran penyaluran bantuan sosial. Barany et al. (2020) berpendapat bahwa ada lima aspek utama yang perlu diperhatikan untuk memfasilitasi efektif dan pendistribusian program bansos yang efisien, yaitu: cakupan program, alur administrasi, durasi pandemi, kesiapan pemerintah, dan mekanisme distribusi. Mereka menekankan pemerintah perlu menyiapkan skema kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), untuk semua kelas sosial yang terkena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Sementara itu, Olivia et al. (2020) berpendapat bahwa Indonesia tidak dapat mengandalkan sektor informal untuk memberikan penyangga terhadap goncangan ekonomi yang dipicu oleh Covid-19. Pekerja informal, yang bergantung pada mobilitas di pasar tenaga kerja dan mungkin bekerja di tempat-tempat ramai, termasuk di antara yang paling terpukul oleh krisis Covid-19 dengan hilangnya mata pencaharian akibat kebijakan social distancing (kasus PSBB di Indonesia). Program stimulus dan pemberian bantuan sosial harus transparan dan akuntabel untuk memastikan target yang akurat, namun berbagai penelitian terkait dengan penyediaan bantuan sosial menunjukkan temuan mengenai kesulitan yang sedang berlangsung dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### Alokasi Anggaran dan Jenis Bantuan Sosial

Pramanik (2020) membahas Bansos dari sudut pandang yang agak berbeda dari Tuwu dan Mufida. Pramanik menganalisis pengaruh Bansos dalam bentuk paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat di daerah Padalarang pada masa pandemi Covid-19. Penelitian dengan metode kausal pada sampel 40 orang penduduk penerima Bansos di kota Padalarang menggambarkan paket sembako dan bantuan langsung tunai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kelangsungan hidup responden. Hasil ini menguatkan fakta bahwa Bansos dapat membantu kelompok marginal dalam menghadapi dampak ekonomi, tetapi evaluasi terhadap pendataan, mekanisme penyaluran, dan bentuk bantuan harus terus dilakukan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya di sektor pariwisata dan ritel mengalami penurunan yang cukup signifikan dampak dan daya beli masyarakat juga menurun, seiring dengan lesunya ekonomi. Meskipun demikian, evaluasi pengumpulan data, mekanisme distribusi, dan bentuk-bentuk pendampingan harus terus dilakukan.

Hasil survei memperlihatkan bahwa bantuan yang didapatkan oleh masyarakat sangat beragam jenisnya dan tidak hanya berupa uang tunai. Selain dari pemerintah banyak kelompok masyarakat dan LSM yang juga turun langsung memberikan bantuan. Bentuk bantuan yang diketahui atau diterima oleh responden secara langsung ditampilkan pada Tabel 1. Di antara para responden, uang tunai adalah bentuk bantuan sosial yang paling banyak didistribusikan, diikuti oleh makanan, dan voucher. Sedangkan APD untuk tenaga medis, susu, suplemen makanan, dan masker non medis menjadi bentuk bantuan yang paling sedikit diterima oleh responden.

Selain bentuk Bansos yang ditampilkan pada Tabel 1, pemerintah Indonesia menjalankan berbagai kebijakan perlindungan masyarakat dan memberikan insentif ekonomi untuk mengurangi dampak ekonomi, di antaranya: Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Stimulus UMKM Mikro dan Ultra Mikro, serta penurunan tarif listrik (Pramanik, 2020). Sebagian besar dari program-program ini merupakan program-program yang telah rutin dilakukan pemerintah. Terkait dengan Covid-19, pemerintah kemudian meningkatkan jumlah penerima bantuan dari program-program yang telah disebutkan sebelumnya (Pramanik, 2020).

**Tabel 1.** Bentuk Bansos yang Pernah Diterima atau Diketahui oleh Responden

Bentuk Bantuan	Jumlah Responden
APD tenaga medis, bahan pangan, dan uang tunai	1
APD tenaga medis	1
Bahan pangan dan uang tunai	3
Bahan pangan	117
Kuota internet atau pulsa	3
Susu, suplemen, produk lain, dan masker non medis	1
Tidak tahu	2
Transfer melalui rekening pribadi	2
Uang tunai	144
Voucher	5
Total	279

Meski bentuk Bansos sudah beragam, ternyata Bansos yang diterima masyarakat sering kali masih tidak sesuai dengan kebutuhan penerima. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan informan yang berada di Papua sebagai berikut:

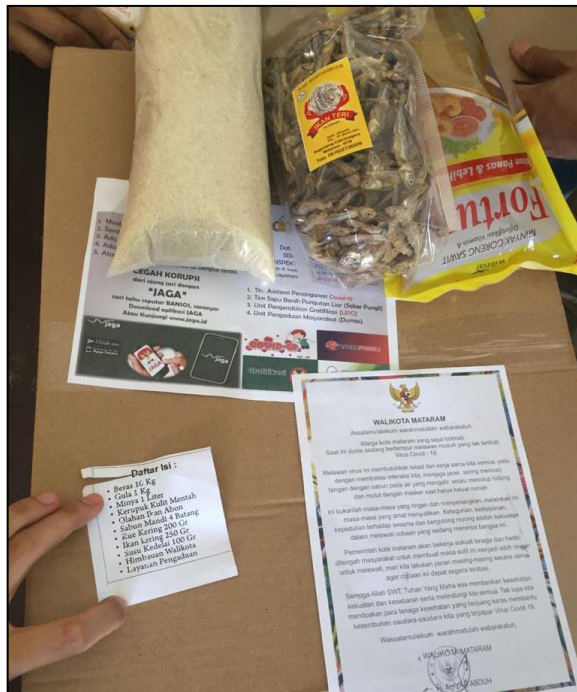
*“Terjadi permasalahan, barang-barang yang menjadi bantuan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Atau harga barang yang dibelanjakan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima masyarakat. Sehingga ada protes dari masyarakat.”*

Pemerintah pusat telah membuat standarisasi terkait paket sembako Bansos yang diberikan kepada masyarakat. Dikutip dari Wicaksono (2021), Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial mengatakan bahwa, isi paket sembako ada 10 jenis yaitu mi instan, kornet, sarden, saos sambal, kecap manis, susu, minyak goreng, teh celup, dan beras serta sabun mandi. Niat baik tersebut tersampaikan namun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal di beberapa daerah di Indonesia termasuk Papua. Dengan memberlakukan kebijakan yang sesuai dengan *local condition* dapat menjadi solusi terkait bentuk bansos kedepannya, sehingga walaupun terdapat *range*, standarisasi, dan menu yang ditawarkan tapi kemudian jika dimungkinkan Pemda boleh melakukan pengajuan bahan pokok yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal sesuai daerah masing-masing, misalnya seperti sagu atau jagung yang menjadi makanan pokok pada daerah tertentu.

Program alternatif perlu dikembangkan untuk mengisi kesenjangan akuntabilitas kebijakan yang di sesuai dengan kondisi masyarakat yang berbeda. Jenis Bansos yang beragam dikarenakan alokasi anggaran dan program penyaluran Bansos yang terpisah antara tiap lembaga pemerintah. Selain itu banyak kelompok masyarakat dan LSM yang juga turun langsung memberikan bantuan.

Menggunakan metode triangulasi, sumber diperiksa dengan melihat dan mendokumentasikan informasi langsung oleh narasumber, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 dan juga melibatkan metode observasi yang memastikan bahwa informasi dan data yang diterima sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Sumber dana bansos tersebar di masyarakat berdasarkan hasil survei singkat ditunjukkan pada Tabel 2. Sumber dana yang beragam seperti terlihat pada Tabel 2 seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengaruh Bansos yang lebih luas pada masyarakat. Tanpa adanya koordinasi dan sinergisitas antar pemberi dana, implementasi Bansos tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga tidak akan tepat sasaran.



**Gambar 1.** Contoh Bansos yang disalurkan di Indonesia [Sumber: Dokumentasi Pribadi]

**Tabel 2.** Sumber Dana dari Bansos yang Pernah Diterima atau Diketahui oleh Responden

Sumber Dana Bantuan Sosial	Jumlah
Pemerintah Daerah, Kemenkes, dan Swasta	1
APBD dan APBN	1
BNPB	1
BPJS ketenagakerjaan	2
Jawaban kesatu dan kedua	1
Kementerian Kesehatan	17
Lembaga Sosial/Agama/komunitas lainnya	16
Pemerintah Daerah	120
Pemerintah dan Lembaga Sosial	1
Pemerintah dan Swasta	1
Pemerintah Pusat / Presiden	110
Swasta	5
Tidak tahu	1
Universitas	2
Total	279

Bansos selama masa pandemi juga disalurkan oleh berbagai negara untuk meringankan beban ekonomi rakyatnya. Bentuk dan target penerima Bansos yang diatur tiap negara untuk rakyatnya diatur melalui berbagai program yang bertujuan untuk meringankan beban rakyat selama pandemi berlangsung. Salah satu contohnya di Negara Malaysia, Bansos yang disalurkan oleh Pemerintah Malaysia direncanakan melalui program ‘Prihatin Rakyat” (*Caring for People*). Melalui program tersebut, Pemerintah Malaysia menyalurkan dana bantuan sebesar MYR260 miliar untuk membantu keberlangsungan perusahaan atau bisnis rakyat menengah - ke bawah dan mikro bisnis dari dampak sosial-ekonomi pandemi Covid-19. Pemerintah menyatakan bahwa golongan tersebut memegang peranan penting dalam keberlangsungan perekonomian Malaysia, dari mana 2/3 tenaga kerja berasal dan peran mereka dalam membangun 40% perekonomian negara. Penyaluran dana dari program tersebut dilakukan oleh pemerintah Malaysia dengan mengumpulkan data dan informasi sebagai acuan untuk mengetahui perusahaan atau bisnis mana yang paling rentan dan paling membutuhkan bantuan dengan cepat (Lim, 2020).

Contoh perencanaan dan penyaluran Bansos di negara lain bisa dilihat dari Inggris. Pemerintah Inggris merencanakan dana Bansos ekonomi sebesar £280 miliar untuk mendukung keberlang-

sungan pekerjaan rakyat, bisnis-bisnis, dan pelayanan publik di Inggris. Bantuan dana tersebut memungkinkan Pemerintah Inggris untuk membayar gaji pekerja di 9,9 juta pekerjaan di Inggris. Dana sebesar £46,4 miliar dikucurkan dalam bentuk hibah (*grants*), melindungi pekerjaan yang terancam hilang karena pandemi, dan hibah untuk wiraswasta dari dana Bansos ekonomi tersebut. Pemerintah juga telah menyediakan berbagai macam skema peminjaman dana, hibah bagi pebisnis, keringanan tarif bisnis, pemotongan pajak, diliburkannya hipotek, peningkatan dukungan kesejahteraan, penangguhan pajak, dan skema *Kickstart and Restart*. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari rencana lengkap pekerjaan yang melindungi, menciptakan dan mendukung pekerjaan di setiap wilayah dan negara Inggris (Parliament by the Prime Minister, 2021).

Refleksi implementasi Bansos berdasarkan perencanaan dan penyaluran Bansos di Malaysia dan Inggris, secara garis besar bantuan disalurkan dalam bentuk dana tunai untuk mendukung aspek sosial dan ekonomi negara. Penyaluran Bansos dalam bentuk tunai juga dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan di Indonesia supaya tidak ada lagi bentuk Bansos yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima. Sedangkan target penerima Bansos tiap negara difokuskan pada pekerja, pebisnis, wiraswasta, dan masyarakat yang rentan terimplikasi pandemi Covid-19 (Lansia dan warga menengah-ke bawah).

### Transparansi dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19

Hasil dari survei online adalah 154 responden (55,19%) merasa tidak ada transparansi dalam pelaksanaan Bansos oleh pemerintah di masa pandemi, 120 responden (43,01%) lainnya merasa ada transparansi dalam pelaksanaan bantuan social, dan 5 responden (1,79%) memilih untuk tidak berkomentar. Hasil survei online terkait transparansi bansos dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Hasil Survei Transparansi pada Proses Implementasi Bantuan Sosial

Kepala Desa berusia 55 tahun di Kota Mataram mengenai distribusi bantuan sosial di wilayahnya menyatakan bahwa:

*“Kepala desa membagi waktu pengambilan bansos sesuai dengan lingkungan masing-masing. Prosesnya berjalan dengan baik. Warga patuhi aturan yang ditetapkan, mendatangi kantor kepala desa dan mengantri untuk mendapatkan bansos, membawa fotokopi KTP dan KK sebagai lampiran (bukti). Tidak ada tumpang tindih karena daftar penerima sudah terdata dengan baik dan akurat. Aparat desa disini juga sudah mendata warganya siapa saja yang berhak menerima. Pendataan dari awal kita lakukan detail biar tidak ada yg kelupaan. Sebelum bansos dibagikan, diinformasikan juga mengenai sembako apa yang didapat oleh warga dan jumlah uang yang diberikan per KK sebagai bentuk transparansi. Kita juga melakukan pengawasan yang ketat saat pembagian bansos agar tidak terjadi penyalahgunaan.”*

Sejumlah daerah memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan pendistribusian bansos, hal ini terkait dengan data yang tumpang tindih dan kurangnya transparansi pendistribusian. Dibuktikan dengan pernyataan salah satu informan berikut ini:

*“Bantuan akan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima. Sebelumnya kita mengecek dulu validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini, sesuai dengan yang tertera atau tidak. Ternyata ditemukan di lapangan adanya ketidaksesuaian data misalnya terdata miskin tidak berpenghasilan namun saat dicek memiliki pekerjaan tetap dengan gaji yang cukup. Kemudian data yang semrawut membuat sasaran penerima bansos tumpang tindih.*

*Misal orang sudah dapat bantuan melalui bantuan tunai. Terus ada lagi skema bantuan beras, ada lagi prakerja, dan sebagainya. Masih ada kejadian yang dapat double seperti itu. Saat pembagian tidak merata, seperti ada yang mendapatkan sampai beberapa tahap namun ada juga yang tidak pernah mendapatkan padahal layak. kriteria pemilihan inilah yang masih kurang transparan.”*

Salah seorang responden (Perempuan, 26 tahun) yang berprofesi sebagai seorang mahasiswa di DKI Jakarta bercerita mengenai pengalaman pribadinya bahwa ada Ketua RT yang menimbun Bansos dari pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongannya sehingga ada daftar penerima Bansos yang tidak menerima bantuan, hal ini kemudian menimbulkan rasa kecemburuan antar masyarakat.



**Gambar 3.** Proses Penyaluran Bansos [Sumber: Dokumentasi Pribadi]

Temuan mengenai keluhan pada proses penyaluran Bansos juga ditemukan pada proses wawancara, Guruh (*Freelancer*, 36 tahun) yang berdomisili di Kutai Kartanegara menyampaikan,

*“Saya pernah mencoba akses bantuan pemerintah dari Kartu Prakerja. Namun dalam 3 gelombang terakhir (8,9,10), dimana saya mendaftar sebagai calon penerima bantuan, tidak pernah satu kalipun lolos sebagai penerima bantuan). Kartu prakerja menurut informasinya merupakan upaya pemerintah membeikan pelatihan yang sesuai dengan pilihan, dan mengganti biaya sebesar Rp.1.800.000 ribu. Dan di lakukan 3 kali pemberian. Dan yang saya harapkan ada pemberitahuan mengapa tidak pernah lolos sebagai penerima bantuan. Karena ada kolega yang sebenarnya mampu secara finansial, namun bisa mendapatkan Bansos Kartu Prakerja.”*

Ketidakpercayaan masyarakat pada transparansi proses penyaluran Bansos turut diperburuk dengan kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial baru-baru ini. KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial untuk penanganan pandemi Covid-19. Penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menemukan uang sejumlah Rp11,9 miliar; 171.085 Dollar Amerika Serikat; dan 23.000 Dollar Singapura pada Minggu, 6 Desember 2020 dini hari. Dalam konferensi pers, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan terdapat lima tersangka dalam kasus ini dan diperkirakan Juliari Batubara menerima uang suap sebesar 17 miliar yang berasal dari pungutan biaya Bansos. Menurut keterangan dari tersangka lainnya, masing-masing paket Bansos dikenakan biaya Rp10.000 (Fikri, 2020).

Pemerintah sebagai penanggungjawab sebuah negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan transparansi. Transparansi dapat terlaksana dengan adanya keterbukaan pada masyarakat. Urgensi keterbukaan publik tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008). Setiap warga negara berhak atas keterbukaan publik dalam pelaksanaan negara yang dijalankan oleh pemerintah. Informasi tentang penyelenggaraan negara dapat berupa proses pembentukan kebijakan publik, keterbukaan anggaran,

hingga evaluasinya. Manfaat dari transparansi adalah warga negara menjadi pintar dan paham bagaimana kualitas kerja pemerintah kemudian dapat menilai, menentukan sikap, dan memberi masukan pada tiap kebijakan. Dalam demokrasi, menghadirkan komunitas dapat meningkatkan fungsi *check and balance* sehingga tidak memberikan ruang untuk pejabat melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Maka keterbukaan publik untuk menghadirkan partisipasi masyarakat perlu terus diusahakan untuk mengawal implementasi bantuan sosial bagi kelompok lemah.

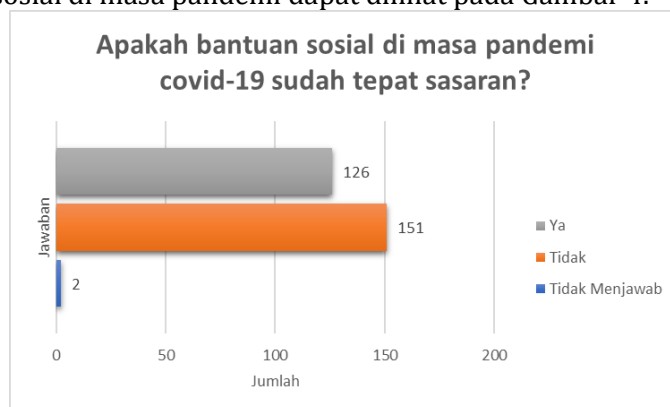
### Ketepatan Sasaran Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19

Dalam artikelnya yang memaparkan kebijakan pemerintah pada penanganan pandemi Covid-19, Tuwu (2020) menyatakan bahwa meskipun Bansos dari pemerintah dapat membantu menyambung hidup untuk jutaan orang terkena dampak, namun kenyataan di lapangan banyak terjadi juga kekisruhan akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran. Kekisruhan ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Hal ini terjadi karena masih berantakan dan belum memadainya data yang tersedia.

Sejalan dengan Tuwu (2020), Mufida (2020) membahas mengenai data penerima Bansos yang tidak satu pintu. Masing-masing Lembaga pemerintah memiliki data penerima, kriteria, dan alokasi anggaran Bansosnya sendiri. Penelitian Suparmadi and Santoso (2019) juga menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan (data) yang dimiliki pemerintah untuk menentukan siapa penerima bantuan tidak memadai.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintah. Dalam kondisi bencana di suatu daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah berkewajiban memberikan bantuan sosial. Tetapi tetap terlihat ketidaksiapan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi COVID-19.

Hasil dari survei online adalah 151 responden (54,12%) merasa bahwa penyaluran bantuan sosial di masa pandemi belum tepat sasaran, 126 responden (45,16%) lainnya merasa sudah tepat sasaran, dan 2 responden (0,71%) memilih untuk tidak berkomentar. Hasil survei online ketepatan sasaran bantuan sosial di masa pandemi dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Survei online ketepatan sasaran bantuan sosial di masa pandemi

Data warga yang berhak menerima Bansos tunai diperoleh dari RT/RW. Proses validasi data kemudian melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencegah terjadi *double data* atau data yang tidak sesuai. Setelahnya, dilakukan validasi ulang oleh Dinas Sosial. Namun, fakta di lapangan menyebutkan bahwa pembagian Bansos tunai masih banyak yang tidak tepat sasaran. Sejak pandemi Covid-19 terjadi, tidak sedikit masyarakat yang tadinya termasuk kelompok kelas menengah kini menjadi kelompok miskin. Baik itu karena kehilangan pekerjaan maupun penghasilan yang menurun. Sedangkan yang berfinansial cukup, namanya terdaftar di data penerima. Hasil survei online sejalan dengan salah satu temuan di Bekasi pada proses wawancara yang dikemukakan oleh Bunga (Dokter, 31 tahun),

*“Yang terjadi di lingkungan perumahan saya, warga yang berkecukupan juga ternyata mendapatkan sembako sehingga sepertinya agak kurang tepat sasaran. Apabila keluarga kita tidak ada yang menjadi salah satu petugas tersebut, saya rasa pemerintah masih kurang di dalam*



*transparansi karena penerima bantuan dan jumlahnya atau bentuk bantuannya juga tidak di-share dan diinfokan ke publik.”*

Sejalan dengan Bunga, Siti (Karyawan Swasta, 34 tahun) di Bukittinggi mengkritisi penyaluran Bansos yang tidak tepat sasaran,

*“Untuk di daerah saya, BLT dibagikan perdaerah dibagi dalam beberapa tahap, ditingkat kabupaten ataupun kota. Namun pembagian, dan masyarakat yang mendapatkan tidak merata, kriteria pemilihan kurang transparan. Ada yang mendapatkan BLT sampai beberapa tahap, namun ada yang tidak pernah mendapatkan padahal menurut saya layak mendapatkan. Informasi saya dapat dari medsos, FB dan sumber langsung, yang bercerita pengalaman tidak mendapatkan BLT, padahal warga sekitarnya mendapatkan, walau secara kondisi ekonomi daerah mereka hampir sama.”*

Berdasarkan Sabarisman et al. (2020) ketua RT/RW atau seseorang dari pihak pemerintah pusat yang ditunjuk untuk terjun langsung dalam pendataan sampai distribusi Bansos memiliki peranan yang penting untuk mengetahui ketepatan sasaran Bansos. Berdasarkan penelitian yang dilakukan saat penyaluran bansos sembako di wilayah Jabodetabek, terdapat ketidaksesuaian antara kuota penerima Bansos yang telah ditetapkan pemerintah dengan banyaknya masyarakat yang harusnya mendapatkan Bansos. Hal tersebut menunjukkan hubungan erat antara tingginya tingkat ketepatan penyaluran Bansos dengan banyaknya jumlah kuota penerima Bansos dan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kuota penerima Bansos. Karena secara prinsip keadilan sosial, Bansos perlu menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan (*no one left behind*). Prinsip tersebut sulit diterapkan jika data pemerintah mengenai masyarakat yang berhak menerima Bansos masih belum *up-to-date* sehingga keputusan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima Bansos tidak tepat sasaran (Sabarisman et al., 2020).

Pemerintah memiliki tujuan yang baik terkait kebijakan Bansos termasuk persyaratannya. Namun alangkah lebih baik apabila persyaratan mempertimbangkan aspek lokal yang tidak dipukul rata semua daerah. Sehingga akan lebih sesuai diterapkan sesuai keadaan masyarakat setempat di masing-masing daerah dan tujuan baik dapat terlaksana secara tepat sasaran. Seperti kutipan wawancara dengan seorang dosen berusia 40 tahun dari Papua berikut ini:

*“Hal yang menjadi kesulitan dari persyaratan penerima bansos ini adalah sebagian besar penduduk Papua tidak memiliki NIK dikarenakan luasnya lokasi dan kesulitan geografis selain itu adanya kepercayaan masyarakat bahwa NIK tidak sesuai dengan keyakinan dan budaya masyarakat Papua. Hal ini menjadi salah satu penyebab Papua menjadi provinsi yang agak terlambat dalam penyaluran Bansos.”*

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa di daerahnya sosial budaya dapat menyebabkan proses implementasi lebih sulit sehingga pemerintah perlu mengadopsi dengan budaya lokal.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawal Program Bantuan Sosial**

Bantuan Sosial yang telah dianggarkan oleh pemerintah tentu diharapkan dapat menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada kelompok masyarakat yang merasa terabaikan. Perlu diperhatikan beberapa hal untuk memastikan ketepatan sasaran penerima Bansos, diantaranya komprehensi data keluarga miskin yang berhak menerima Bansos dan penyaluran Bansos melalui metode yang efektif. Data keluarga miskin di Indonesia perlu terintegrasi dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat agar penyaluran Bansos berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Persoalan data sangat penting dalam proses penyaluran karena tidak jarang ada orang yang tidak seharusnya memenuhi syarat untuk mendapatkan Bansos, malah mendapatkan Bansos. Pembaharuan dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan agar data yang ada dapat dipercaya, oleh karena itu diperlukan koordinasi dalam melibatkan pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga pengawas dalam mengontrol untuk meminimalkan kesalahan data. Permasalahan berupa data yang tidak akurat, merupakan salah satu pokok permasalahan implementasi bantuan sosial pada pandemi Covid-19. Data masyarakat yang layak untuk dibantu dan memiliki potensi untuk dibantu harus selalu diperbaharui, sehingga terjadinya kesalahan penerima bantuan sosial dapat

diminimalkan. Di masa depan, diharapkan penyaluran Bansos lebih tepat sasaran jika data penduduk Indonesia sudah terintegrasi. Pemerintah diharapkan memperbaiki data penduduk dengan sigap dan cermat mengingat penyaluran Bansos akan terus berjalan selama pandemi belum akan berakhir dalam waktu dekat. Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan usaha pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan data penduduk seharusnya dapat menjadi solusi efektif untuk menjalankan program Bansos yang tepat sasaran. Kebijakan tersebut berfungsi untuk penentuan kebijakan dan pemenuhan kebutuhan data bagi warga negara Indonesia, namun sangat disayangkan implementasinya belum berjalan sebagaimana mestinya.

Setiap daerah dapat menyelesaikan masalah masing-masing yang hanya dapat diselesaikan oleh kepala desa, lurah, dan Pemda yang paling mengerti kondisi daerah tersebut. Bentuk Bansos dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal atas inisiatif kepemimpinan di daerah masing-masing supaya dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Perubahan dapat dilakukan dengan catatan tetap diawasi bersama oleh forum yang melibatkan wakil *stakeholder* seperti masyarakat, tokoh desa, dan tokoh masyarakat. Misalnya banyak masyarakat yang belum paham dengan gejala Covid-19 salah satunya adalah demam. Masyarakat awam masih belum bisa membedakan keadaan ketika kondisi sudah demam. Bentuk Bansos dapat dimanfaatkan ke arah *screening*, dengan pemenuhan termometer untuk keperluan *screening* mandiri di masyarakat.

Keterlibatan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan di seluruh Indonesia patut mendapat perhatian. Unit-unit ini berperan aktif dalam merawat bagian masyarakat yang rentan, terutama kaum miskin dan lanjut usia (Pradana et al., 2020). Kesatuan masyarakat tersebut berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjangkau anggota masyarakat terkecil (Pradana et al., 2020). Tulisan Pradana et al. (2020) sejalan dengan temuan di lapangan seperti diceritakan Siti (Karyawan Swasta, 34 tahun),

*“Dana bantuan di masa pandemi COVID-19 disediakan pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, dibagikan dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) namun di beberapa daerah ada yang memodifikasinya. Bantuan ini untuk membantu perekonomian masyarakat, dan juga agar dapat bertahan hidup di masa pandemi ini.”*

Senada dengan kutipan di bawah ini oleh Kepala Desa NTB

*“Di lapangan berdasarkan analisis situasi kami lakukan inisiatif untuk mengubah dan memodifikasi besaran bantuan atau alokasi penerima. Kami tau ini berisiko karena tidak sesuai dengan aturan tapi buat saya inilah ukuran kepemimpinan kita.” (Lurah NTB)*

Berdasarkan temuan di lapangan, khususnya saat wawancara dengan informan dari Lombok dan Papua, terungkap pula bahwa suatu tindakan atau kebijakan yang diambil oleh lurah dan kepala distrik dapat berubah tergantung situasi yang ada. Seperti ada masyarakat yang belum terdaftar tetapi akhirnya diputuskan dapat diberikan Bansos namun dengan mengurangi isi bantuan. Misalnya beras yang semula 10 Kg untuk 1 orang dialokasikan menjadi 2 orang dengan jumlah 5 Kg. Pada kasus ini terlihat pemimpin daerah mengambil risiko, dengan mempertimbangkan kondisi kekinian (*current situation*) dan kearifan lokal masing-masing wilayah. Kemampuan membaca situasi dibutuhkan untuk mengoptimalkan penyaluran Bansos dari pemerintah pusat bagi warganya yang membutuhkan.

### Simpulan

Permasalahan implementasi Distribusi Bansos yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia masih diikuti dengan beberapa kekurangan, terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas. Permasalahan implementasi secara umum dikelompokkan menjadi: (1) Alokasi anggaran yang terpisah antara tiap lembaga pemerintah; (2) Sistem penyaluran yang tidak transparan; (3) Data dan kriteria masyarakat yang berhak menerima Bansos belum terintegrasi pada tiap lembaga pemerintah; (4) Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan.

Berdasarkan hasil tersebut, maka yang dapat kami sarankan adalah: (1) Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru dalam pelaksanaan bansos agar tepat sasaran dengan menemukan cara-cara untuk integrasi data bansos misalnya seperti kebijakan implementasi satu data; (2)

Memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian dalam implementasi Bansos di suatu daerah tertentu selama masih dalam pengawasan forum wakil masyarakat, unsur media, tokoh/akademisi yang ada, untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas masih tetap berjalan; hal ini dilakukan untuk memastikan ketepatan alokasi bagi penerima bansos dengan menerapkan prinsip *local problem solved by local people*. Akan lebih baik apabila pemerintah daerah dapat memasukan bahan pokok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, seperti contoh pemberian sagu dan jagung yang merupakan makanan pokok di beberapa wilayah.

### Daftar Pustaka

- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). Bantuan sosial ekonomi di tengah pandemi COVID-19: Sudahkah menjaring sesuai sasaran. In *Centre for Strategic and International Studies* (pp. 1–11). Centre for Strategic and International Studies.  
<https://www.csis.or.id/publications/bantuan-sosial-ekonomi-di-tengah-pandemi-covid-19-sudahkah-menjaring-sesuai-sasaran>
- Ellwood, S. (1993). Parish and town councils: Financial accountability and management. *Local Government Studies*, 19(3), 368–386. <https://doi.org/10.1080/03003939308433687>
- Fikri, A. (2020). *KPK tahan menteri sosial terkait perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19*. Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.  
<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1986-kpk-tahan-menteri-sosial-terkait-perkara-dugaan-suap-pengadaan-bansos-covid-19>
- Hernawati, S. (2017). *Metodologi penelitian dalam bidang kesehatan, kuantitatif & kualitatif*. Library Forikes. <http://forikes-ejournal.com/ojs-2.4.6/index.php/lib/article/view/639>
- Kohler, J. C., & Bowra, A. (2020). Exploring anti-corruption, transparency, and accountability in the World Health Organization, the United Nations Development Programme, the World Bank Group, and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. *Globalization and Health*, 16(1), 101. <https://doi.org/10.1186/s12992-020-00629-5>
- Lim, L. L. (2020). *The socioeconomic impacts of COVID-19 in Malaysia: Policy review and guidance for protecting the most vulnerable and supporting enterprises*. International Labour Organization.
- Mufida, A. (2020). Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemic Covid 19. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15669>
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174.  
<https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>
- Parliament by the Prime Minister. (2021). *Covid-19 response: Spring 2021*.  
[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/963491/COVID-19\\_Response\\_-\\_Spring\\_2021.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/963491/COVID-19_Response_-_Spring_2021.pdf)
- Pradana, M., Rubiyanti, N., S., W., Hasbi, I., & Utami, D. G. (2020). Indonesia's fight against COVID-19: the roles of local government units and community organisations. *Local Environment*, 25(9), 741–743. <https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1811960>
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(12), 113–120.  
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/209>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pub. L. No. 14 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. T. S. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>

- Sabarisman, M., Setiawan, H. H., Sulubere, M. B., Pudjianto, B., & Delfirman, D. (2020). *Ketepatan sasaran dan nilai kemanfaatan bantuan sosial sembako di Jabodetabek*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suparmadi, S., & Santoso, S. (2019). Sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan sosial untuk keluarga miskin dengan metoda simple additive weighting (SAW). *Journal Of Science And Social Research*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.54314/jssr.v2i1.387>
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Wibowo, A. (2014). *Metodologi penelitian praktis bidang kesehatan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Wicaksono, W. (2021). *Special content: 7 bansos dilanjutkan, mampukah tingkatkan daya beli di era pandemi?* Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/4475500/special-content-7-bansos-dilanjutkan-mampukah-tingkatkan-daya-beli-di-era-pandemi>